

No.

Date

Nama: Anggun Lestari

NPM: 2512120028

MK: Akuntansi Publik 2 AK1

Bab 5

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

5.1 Pengembangan Anggaran Sektor Publik

Pengembangan Anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat 2 jenis pendekatan utama yaitu:

5.2 Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan. Ciri-ciri adalah cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan implemenat dan b struktur dan susunan anggaran.

5.3 Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM Era New Public Management berfokus pada:

1. Pemerintahan katais
2. Pemerintahan milik Masyarakat
3. Pemerintahan kompetitif
4. Pemerintahan digerakan misi
5. Pemerintahan berorientasi pada hasil
6. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan
7. Pemerintahan wirausaha.

No.

Date

8. Pemerintah antisipatif
9. Pemerintah dengan prioritas
10. Pemerintah yang berorientasi pada mekanisme pasar

5.4 Perubahan Pendekatan Anggaran

Pendekatan baru dalam sistem anggaran, zero-based Budgeting (ZBB) Planning, Programming & Budgeting System (PPBS).

5.4.1 Anggaran Kinerja

Menurut anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja serta eksternal.

5.4.2 Zero-based Budgeting (ZBB)

Menyusun anggaran dengan ini dapat menghilangkan incremental dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-based).

5.4.3 Planning, Programming dan Budgeting System (PPBS)

Teori anggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya analisis ekonomi.

No.

Date

Masalah Utama Penggunaan ZBB dan PPBS

1. Bounded rationality
2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif
3. Masalah ketidakepastian sumber daya
4. Penyesuaian teknik menimbulkan beban pekerjaan
5. Kesulitan menentukan tujuan
6. Sering kali tidak melakukan perubahan cepat
7. Ada hambatan birokrasi dan pelaksanaan politik
8. Penyesuaian teknik tidak sesuai dengan pengambilan keputusan politik
9. Pemerintahan bergasi dalam dunia tidak rasional

5.5 Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah di Indonesia

UU No. 17 Tahun 2003 & No. 12 Tahun 2019.

Berikut poin-poin penting materi pengelolaan keuangan negara dan daerah:

1. Dasar hukum utama
2. Ruang lingkup dan penerapan
3. Siklus Pengelolaan
4. Sumber pendanaan
5. Asas pengelolaan keuangan daerah